

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
EKONOMI MAKRO SYARIAH DI INDONESIA

Aye Sudarto
IAI Agus Salim Metro

Abstract

Macroeconomics that play an important role can often have a serious impact on a country's growth. We can mention one by one what is part of the macro economy that affects the national economy are low economic growth, poverty and unemployment, inflation, low rupiah exchange rate, energy crisis, state budget deficit, and imbalance of trade balance and payments become adult national economic problems this. In view of the growth, development, opportunities and challenges of sharia macroeconomics in Indonesia, it is important that we first understand the economic system adopted by Indonesia today. As we know that what determines the shape of an economic system except the basis of a state philosophy that is upheld, the criteria are institutions, especially economic institutions that become the manifestation or realization of the philosophy.

Sharia Macroeconomics in Indonesia is not yet signifi cant in influencing macroeconomic conditions in Indonesia, due to its small assets compared to conventional economies. Indonesia has the potential to be able to position itself as the center of World Sharia finance. We have strong capital to make this happen, because besides Indonesia is the largest Muslim country in the world, Indonesia is also a member of the G-20 and a country with the fifth largest population in the world that has a rapidly growing middle income. Sharia economy and finance can make a very significant contribution in lifting the quality of the Indonesian economy.

Keyword : *Macroeconomics, Sharia Macroeconomics, Sharia Finance*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 Indonesia lebih merasakan dampak kelesuan ekonomi global dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2018 perekonomian Indonesia terus menerus mengalami perlambatan. Dengan prospek ekonomi global yang lebih baik di tahun 2019, seharusnya Indonesia pun dapat tumbuh lebih cepat. Akan tetapi, kendala-kendala yang kita hadapi saat ini, yang akan terus berlangsung di 2019, akan menyulitkan perekonomian Indonesia untuk tumbuh dengan laju yang lebih cepat.¹

Masalah ekonomi adalah masalah *What – How many/How Much –How – For Whom* yang meliputi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemecahan masalah dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melihat sistem ekonomi yang diterapkannya. Jika negara bisa memecahkan masalahnya, maka rakyat akan hidup sejahtera.²

Ekonomi makro yang memegang peranan penting acap kali bisa memberikan dampak yang serius dalam pertumbuhan suatu negara. Dapat kita sebutkan satu per satu apa yang menjadi bagian dari ekonomi makro yang mempengaruhi ekonomi nasional adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan

¹ Laju pertumbuhan ekonomi global diproyeksi akan melemah. Bank Dunia pun merevisi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 ini jadi 2,9 persen dari 3 persen di 2018 lalu. Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/101500026/bank-dunia-laju-pertumbuhan-ekonomi-global-2019-melemah) dengan judul "Bank Dunia: Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2019 Melemah", <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/101500026/bank-dunia-laju-pertumbuhan-ekonomi-global-2019-melemah>. Penulis : Mutia Fauzia Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan Akses tanggal 11 Juli 2019. Akses 11 Juli pukul 10.08. Lihat: <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia-triwulan-i-tahun-2019/> Akses 11 Juli 2019 pukul 10.11

²<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-3-permasalahan-ekonomi-modern-untuk-peningkatan-bisnis/> Akses tanggal 11 Juli 2019 pukul 10.17

pengangguran, inflasi, rendahnya nilai kurs rupiah, krisis energi, defisit APBN, juga ketimpangan neraca perdagangan dan pembayaran menjadi permasalahan ekonomi nasional dewasa ini.

Dalam sudut pandang pertumbuhan, perkembangan, peluang dan tantangan ekonomi makro syariah di Indonesia, penting kiranya kita memahami terlebih dahulu sistem ekonomi yang di anut oleh Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.

Pergulatan pemikiran tentang sistem ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistem ekonomi pancasila pergulatan pemikiran pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.³

Secara normatif landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemeerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang).⁴

Sistem ekonomi Pancasila yang dimiliki Indonesia disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Dimana yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Demokrasi memiliki ciri ciri: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.⁵

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etika dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

Topik ekonomi makro yang diangkat oleh penulis diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kontribusi ekonomi makro syariah, permasalahan, dan pemecahan permasalahan ekonomi nasional yang berdampak bagi kita sebagai bagian dari negara Indonesia.

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DI INDONESIA

³ Aditya Nugroho. *Sistem ekonomi Indonesia*, dalam <http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2011/02/sistem-ekonomi-indonesia.html> /accessed 11 Juli 2019 Pukul 10.30

⁴ Novita Aprillia, *Sistem Ekonomi Indonesia*, <http://nophitaputri.blog.fisip.uns.ac.id/2011/05/23/artikel-sistem-ekonomi-indonesia-tugas-kelompok-untuk-memenuhi-mata-kuliah-sistem-ekonomi-indonesia/> accessed 11 Juli 2019 Pukul 11.40

⁵ Aye Sudarto, *Perekonomian Indonesia*, Purnama Jaya 2019,hal 100

Ekonomi makro atau makro-ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.⁶

Kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek (siklus bisnis), dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang (peningkatan pendapatan nasional). Model makro-ekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis⁷.

Ekonomi makro melihat dan menganalisis Variabel-variabel ekonomi makro secara *agregat* (keseluruhan), dengan cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan secara berkesinambungan. Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.⁸ Adapun faktor yang mempengaruhi makro ekonomi Indonesia saat ini adalah krisis utang eropa yang menyebabkan melemahnya perekonomian global.

Perekonomian nasional saat ini berada dalam *critical point*. Factor melemahnya nilai rupiah, inflasi yang terus naik disertai dengan deficit transaksi berjalan semakin tergerusnya cadangan devisa akibat *capital outflow* dan besarnya hutang luar negeri swasta jangka pendek yang jatuh tempo⁹. Memburuknya indikator makro ekonomi Indonesia sudah berjalan satu tahun terakhir. Tekanan yang dihadapi ekonomi nasional disebabkan oleh memburuknya ekonomi *emerging economies* serta kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidak pastian.

Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), telah terjadi perlambatan dalam kuartal pertama 2019. Dalam APBN 2019 pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%¹⁰. Sulitnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2019 yang masih dibawah ekspektasi pemerintah., tercatat 5,07% dan sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya 5,06 % (yoy)¹¹.

Gambar, 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

⁶ Mucholifah, *Ekonomi Makro*. Unesa University Pers 2008 hal 2

⁷ id.wikipedia.org

⁸Gustra Arianda, *Makro Ekonomi Indonesia*, dalam <http://payakumbuhh.blogspot.com/2011/05/contoh-makalah-ekonomi-makro-di.html/> accessed 3 Agustus 2013

⁹ Barratut Taqiyah dan Edy Can, *Ekonomi tetap tumbuh di tengah krisis Eropa*, dalam http://lipsus.kontan.co.id/v2/outlook/read/42/ekonomi_makro/ accessed 3 Agustus 2013

¹⁰ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, akses tanggal 11 Juli 2019 pukul 13.41

¹¹ Kementerian Keuangan RI, *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*, Edisi Mei 2019 hal 15. Lihat juga Kementerian BPPN/Bapenas, *Perkembangan Ekonomis Indonesia dan Dunia, Truwulan I Tahun 2019, Vol 13 no 1. Mei 2019 hal 13*



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam rangka merespon merosotnya instabilitas ekonomi makro karena merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintahan mengeluarkan paket kebijakan, meliputi: Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan untuk meletakkan dasar agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Bank Indonesia telah mempersiapkan 5 kebijakan yang ditempuh untuk mengarungi kondisi perekonomian global tahun 2019.¹² *Pertama* adalah dengan tetap menempuh kebijakan preemptive, front loading, dan ahead the curve. “Kebijakan ini untuk menahan arus modal keluar dan penguatan dolar serta untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental,”.

Kedua adalah BI akan tetap melanjutkan arah kebijakan makro-prudensial yang akomodatif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. *Ketiga* adalah dengan mengakselerasi pendalaman pasar keuangan dan mendukung pembiayaan ekonomi yang lebih luas. Pengembangan pasar valas melalui DNDF dan juga pasar rupiah untuk membantu pemerintah mendapatkan pembiayaan infrastruktur lewat pedalaman pasar keuangan,”.

Keempat BI adalah melanjutkan peran kebijakan sistem pembayaran dalam mendukung kegiatan ekonomi. Kebijakan selanjutnya adalah dengan mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah hingga ke daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. “Pertumbuhan akan lebih tinggi dan cepat meningkat sejak tahun depan sebagai dampak dari reformasi struktural, infrastruktur, dan perbaikan iklim investasi,”

Kelima BI akan melanjutkan sinergi dengan pemerintah, OJK, LPS, dan dunia usaha untuk menjaga momentum pertumbuhan. Sinergi tersebut telah terbukti menjadi kunci keberhasilan Indonesia meredam dampak spill over dari serangan ekonomi global. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan untuk meletakkan dasar agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik

Penetapan pajak barang mewah lebih tinggi, dan barang impor bermerk dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%. Pemberian insentif kepada industry padat karya termasuk keringan pajak, pemerintah dengan bank sentral menjaga gejolak harga dan inflasi dan mengefektifkan layanan terpadu satu pintu perizinan

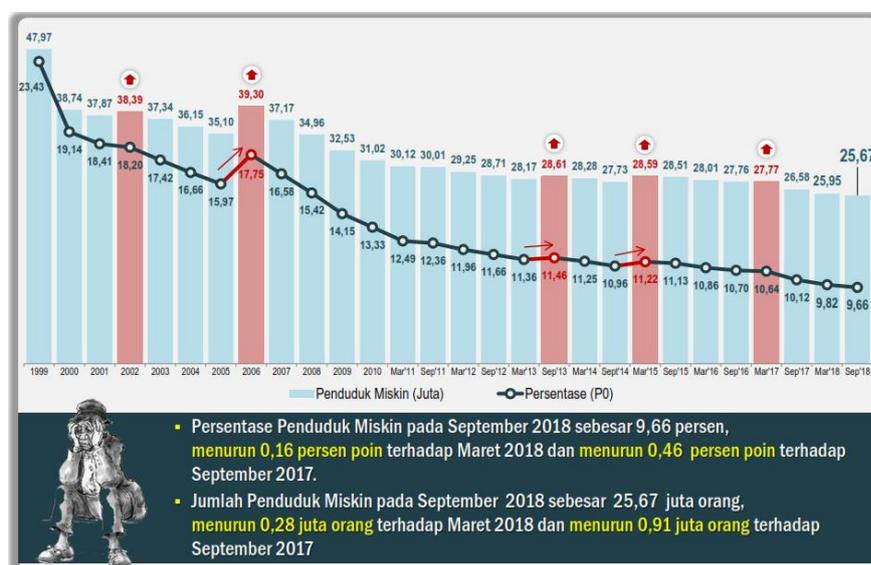
¹² Iqbal Musyaffa, *Bank Indonesia tempuh 5 kebijakan hadapi ekonomi 2019*, <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bank-indonesia-tempuh-5-kebijakan-hadapi-ekonomi-2019/1431048>, akses tanggal 13 juli 2019 pukul 8.46

investasi. Paket kebijakan diharapkan mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia di tengah semakin memburuknya perekonomian emerging economies, serta ketidak pastian ekonomi global. Ternyata paket tersebut belum mampu meredam volatilitas ekonomi makro, rupiah terus terdepresi dan IHSG terus turun¹³.

Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, pemerintah mengklaim telah berhasil menekan angka kemiskinan. Penting untuk dicermati batas garis kemiskinan yang dijadikan parametet pemerintah sudah mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data BPS penduduk miskin Indonesia pada september 2018 25,67 juta turun 0,28 terhadap maret 2018 dan menurun 0,91 juta pada Maret 2017 terhadap september 2017.¹⁴. Menurut BPS, garis batas kemiskinan meningkat 4,66% dari IDR 259.520 per kapita perbulan pada September 2017 menjadi IDR 271.520 per kapita per bulan pada Maret 2018.

Gambar. 2. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, tahun 2017 -2018¹⁵



¹³Op. Cit. Barratut, hal 5. ROSIANA HARYANTI Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "Relaksasi Pajak Barang Mewah Bakal Bangkitkan Sektor Properti", <https://properti.kompas.com/read/2019/03/29/172048821/relaksasi-pajak-barang-mewah-bakal-bangkitkan-sektor-properti?page=all>. Akses tanggal 13 Juli 2019 pukul 9.22.

¹⁴ www.bps.go.id

¹⁵ BPS, *Berita Resmi Statistik*, 15 Januari 2019

Gambar, 3. Prosentasi penduduk Miskin Perkotaan dan perdesaan Maret 2017 - September 2018¹⁶

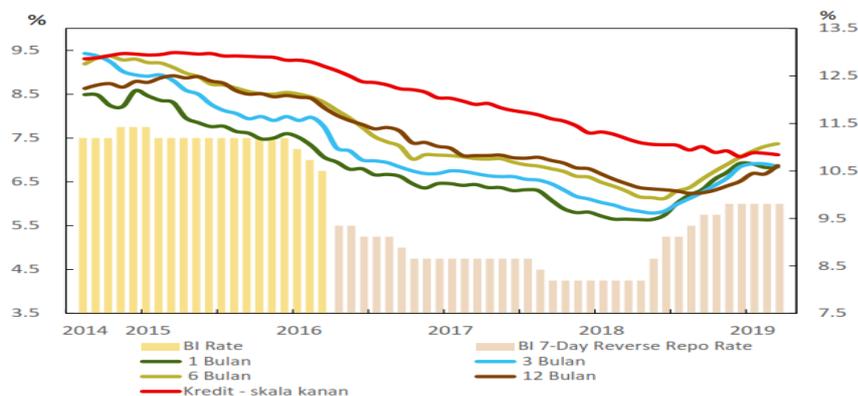


Bulan Maret 2019, BI mencatat jumlah uang beredar M1 dan M2 mencapai IDR 5.744,2 triliun atau tumbuh 6.5% Lebih tinggi dibanding pada bulan sebelumnya sebesar 6.0% (yoy). Akselerasi terutama didorong komponen uang beredar arti sempit (M1) dan surat berharga selain saham masing masing tumbuh sebesar 4,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,6% (yoy) dan 16,8%(yoy).¹⁷

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, peningkatan pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi perbaikan pertumbuhan aktiva luar negeri bersih serta ekspansi keuangan pemerintah. Pertumbuhan aktiva keuangan luarnegeri bersih mulai membaik walau tetap negatif, menjadi -3,7 (yoy) dari sebelumnya -5,1% (yoy).¹⁸

Tahun 2019 BI mematok suku bunga acuan (BI rate) sebesar 6%.¹⁹ Kebijakan ini diambil sebagai antisipasi terhadap inflasi dan respon terhadap pelemahan rupiah seiring dengan arus keluar modal asing.²⁰

Gambar, 4. Perkembangan BI rate, suku Bunga SBI, deposito dan penjaminan tahun 2017 – 2019 dalam %



Cadangan devisa Indonesia merupakan asset eksternal yang dapat langsung tersedia dan berada di bawah control bank sentral selaku otoritas moneter untuk membiayai ketidak seimbangan neraca pembayaran, serta melakukan intervensi di pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai tukar.

¹⁶Ibid,hal 34

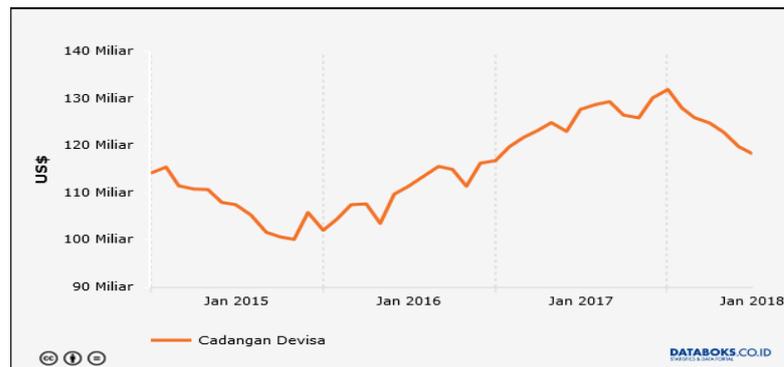
¹⁷ Bank Indonesia, Analisis Uang Beredar dan Faktor yang Mempengaruhi, Maret 2019.

¹⁸ Ibid

¹⁹ <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx> Akses tanggal 13 Juli 2019 pukul 11.41

²⁰ Op.Cit , Sri Adiningsih hal 9

Gambar, 5. Cadangan Devisa Indonesia tahun 2015 -2018 (dalam USD milyar)²¹



Posisi cadangan devisa semakin tergerus karena devisa transaksi berjalan, yang meningkatkan padahal surplus transaksi modal dan financial belum dapat menutup deficit transaksi berjalan, sehingga neraca berjalan deficit. Cadangan devisa tercatat merosot sebesar USD 20,11 milyar dari USD 112,78 milyar pada desember 2015 menjadi USD 92.997 milyar pada agustus 2018.²² Kondisi cadangan devisa ini membuat upaya bank sentral melakukan intervensi terhadap nilai tukar rupiah semakin terbatas. Padahal kebutuhan USD untuk membayar utang luar negeri cukup besar. Berdasarkan data BI, pembayaran utang luar negeri sepanjang tahun 2017 mencapai USD28,88 milyar. Tekanan yang tinggi pada pasar keuangan global di tengah malamatnya pertumbuhan ekonomi dunia telah memberikan tekanan pada kinerja perdagangan dan pasar keuangan nasional.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 hingga akhir Mei lalu membaik dibanding bulan sebelumnya. Namun demikian, Performa penerimaan pajak yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar masih tumbuh melambat ketimbang periode sama pada 2018. Perbaikan kinerja APBN tercermin dari peningkatan pendapatan dan penyerapan belanja negara. Total pendapatan dan hibah per akhir Mei mencapai Rp 728,45 triliun, setara 33,64% dari target APBN. Angka ini tumbuh 6,2% yoy. Pertumbuhan itu lebih baik dari bulan sebelumnya hanya 0,49%.²³

Lalu, realisasi belanja negara hingga Mei tumbuh 9,8% yoy atau mencapai Rp 855,91 triliun, setara 34,78% dari pagu APBN 2019. Bulan sebelumnya, pertumbuhan penyerapan belanja cuma 8,39%. Keseimbangan primer juga membaik, hanya defisit Rp 0,4 triliun per Mei 2019. Jauh merosot dari defisit bulan sebelumnya Rp 31,38 triliun.²⁴ Namun saat bersamaan, terjadi pelemahan ekonomi yang memengaruhi pendapatan negara. Semua pertumbuhan komponen pendapatan negara melambat dibanding pencapaian periode yang sama tahun lalu.

²¹ www.bi.go.id

²² Ibid

²³ Noverius Laoli Harian KONTAN <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-negara-menunjukkan-sinyal-mengkhawatirkan> Akses Tanggal 13 Juli 2019 pukul 17.52

²⁴ Ibid

Sementara realisasi penerimaan perpajakan termasuk bea dan cukai tercatat Rp 727,7 triliun atau 31,9% dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun. Realisasi itu hanya tumbuh 5,7% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan Mei 2018 mencapai 14,5%. Yang makin jadi masalah, penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan (PPH) migas cuma tumbuh 2,4% yoy menjadi Rp 496,6 triliun.²⁵ Ini merupakan *critical point* (titik kritis) bagi pemerintah untuk melihat terus tanda-tanda ekonomi, apakah *steady* (cenderung) menguat atau mengalami pelemahan.

Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melemah, hanya tumbuh 8,6% yoy, di bawah pertumbuhan setahun sebelumnya sebesar 18,1. Kinerja PNBP terdorong signifikan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dan dimiliki Bank Indonesia (BI). "PNBP tanpa ada pendapatan dari BI masih flat. Ini menggambarkan SDA (sumber daya alam) tertekan,". "Penyebabnya adalah kondisi ekonomi dan ada kebijakan dari kami," Semua komponen penerimaan pajak mengalami perlambatan pertumbuhan. Bahkan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tumbuh negatif 4,4%.

Kebijakan percepatan restitusi membuat pertumbuhan PPN dan PPnBM minus. Kalau tanpa restitusi, pertumbuhannya bisa positif 2,8%. "Jadi secara ekonomi, konsumsi dalam negeri maupun impor memang melambat. Pelambatan ekonomi juga melemahkan PPh nonmigas yang hanya tercapai Rp 294,1 triliun atau 35,5% dari target APBN 2019. Realisasi ini tumbuh 7,1%, melambat dibanding pertumbuhan periode sama 2018 mencapai 14,3%.

Realisasi Surat Berharga Negara (SBN) hingga akhir April 2019 mencapai Rp160,49 triliun atau 41,26 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019 dan pinjaman luar negeri mencapai Rp15,08 triliun atau 49,96 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019. Sementara itu, hingga akhir April 2019, belum terdapat penarikan untuk pinjaman dalam negeri. Untuk periode April 2019, realisasi SBN neto lebih kecil dibandingkan dengan realisasi bulan April 2018, dimana pada bulan tersebut, realisasi SBN neto mencapai Rp194,73 triliun.²⁶

Gambar. 6. Pembiayaan Hutang tahun 2019

	2019		
	APBN	s.d. 30 April	% APBN
Pembiayaan Utang	359.250,6	144.984,7	40,36%
1. Surat Berharga Negara (Neto)	388.957,9	160.489,9	41,27%
2. Pinjaman (Neto)	(29.707,3)	(15.505,2)	52,19%
a. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482,4	(421,7)	-87,41%
I. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1.956,4	0,0	0,00%
II. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1.473,9)	(421,7)	28,61%
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.189,7)	(15.083,5)	49,96%
I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	60.280,5	9.920,8	16,46%
II. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(90.470,2)	25.004,4	27,63%

Demikian juga penarikan pinjaman luar negeri lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang sebesar hampir setengahnya. Pinjaman dalam negeri pada periode April 2019 walaupun belum

²⁵ *Ibid*

²⁶ Kementerian Keuangan RI. APBN Kita, Edisi Mei 2019 hal 43

terdapat penarikan namun telah terdapat transaksi untuk pembayaran cicilan pokok yaitu sebesar Rp421,7 miliar rupiah. Dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri, Pemerintah semakin membatasinya untuk menghindari fluktuasi mata uang yang nantinya akan membebani anggaran serta semakin berdayanya dukungan domestik dalam pembangunan dan pembiayaan defisit.

Sementara itu, pada tahun 2019 ini telah dialokasikan pembiayaan yang bersumber dari SBN (SBSN) sebesar Rp28,43 triliun pada tujuh K/L yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Badan Standarisasi Nasional (BSN), dengan cakupan proyek mencapai 619 proyek yang tersebar di 34 propinsi²⁷.

Dalam mengelola utang yang akuntabel, Pemerintah benarbenar memperhitungkan bahwa setiap rupiah utang yang dilakukan Pemerintah harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor maupun investor dalam menjaga kepercayaan mereka dengan menganggarkannya dalam APBN 2019 yang telah disetujui wakil rakyat.

Gambar. 7. Posisi Hutang Sampai akhir April 2019

(dalam Triliun Rupiah)

	April - 18		April - 19	
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi
Total Utang Pemerintah Pusat	4.180,61	100,00%	4.528,45	100,00%
a. Pinjaman	773,47	18,50%	780,71	17,24%
1. Pinjaman Luar Negeri	768,11	18,37%	773,98	17,09%
Bilateral	327,08	7,82%	319,67	7,06%
Multilateral	397,82	9,52%	415,68	9,18%
Komersial	42,03	1,01%	38,64	0,85%
Suppliers	1,18	0,03%	-	0,00%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,36	0,13%	6,73	0,15%
b. Surat Berharga Negara	3.407,14	81,50%	3.747,74	82,76%
1. Denominasi Rupiah	2.427,76	58,07%	2.735,78	60,41%
Surat Utang Negara	2.049,79	49,03%	2.260,50	49,92%
Surat Berharga Syariah Negara	377,96	9,04%	475,28	10,50%
2. Denominasi Valas	979,38	23,43%	1.011,96	22,35%
Surat Utang Negara	764,28	18,28%	795,89	17,58%
Surat Berharga Syariah Negara	215,09	5,15%	216,07	4,77%
Rasio Utang thd PDB			29,65%	

Rasio utang terhadap PDB sampai dengan April 2019 adalah 29,65 persen, sedikit menurun dibandingkan rasio pada bulan Maret 2019 yang sebesar 30,12 persen. Per akhir April 2019, jumlah outstanding utang menurun Rp38,86 triliun dibandingkan akhir Maret 2019. Strategi pendalaman pasar domestik yang diiringi

²⁷ *Ibid*, hal 44

dengan penerbitan berbagai variasi instrumen SBN mulai menampakkan hasil yang menggembirakan.²⁸ Hal ini dapat diukur melalui minat masyarakat yang semakin meningkat dalam memiliki SBN yang secara tidak langsung juga meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan nasional melalui SBN..

KONTRIBUSI EKONOMI MAKRO SYARIAH

Ekonomi dan keuangan Syariah kini sudah menjadi komoditas global dan sudah diadopsi oleh institusi multinasional dan berkembang di banyak negara barat dimana Muslim adalah minoritas. Harus diakui bahwa selama beberapa dekade ekonomi Syariah seringkali diasosiasikan hanya dengan segelintir kaum Muslimin yang mencari alternatif lain dalam berbisnis. Lebih dari itu terminologi ekonomi Syariah direduksi hanya kepada lembaga keuangan seperti bank, asuransi, gadai dan pasar modal. Sementara sektor riil seperti industry makanan, manufaktur, pertambangan, pariwisata, sinematografi, farmasi, kosmetik, busana dan aneka industri jasa yang sangat luas dan beragam seolah tidak ada kaitannya dengan ekonomi Syariah. Akibat kedangkalan pemahaman ini, ekonomi syariah menjadi kerdil bahkan dianggap sebagai gerakan sektarian. Padahal ekonomi syariah merangkum seluruh kegiatan komersial yang berbasis etika, transparansi, kejujuran dan semangat berbagi *risk and return*. Ekonomi syariah adalah Mesin Ekonomi Kedua (*second economic engine*) setelah ekonomi umum (*conventional economy*) yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia²⁹.

Kehadiran Ekonomi Syariah di bumi Indonesia sesungguhnya sudah dimulai sejak datangnya Islam itu sendiri, karena pokok-pokok hukum bisnis dan ekonomi sudah termaktub dalam al Qur'an dan Hadist yang menjadi sumber hukum utama umat Islam. Namun karena unsure penjajahan barat dan berbagai masalah sosial budaya lainnya suara ekonomi Syariah baru terdengar dengan kehadiran Syarikat Dagang Islam pada tahun 1911. Sungguh pun demikian prinsip Syariah sudah hadir dan dikenal lebih lama di bumi pertiwi dengan istilah *maparo*, *pertelu* dan prinsip bagi hasil rumah makan padang. Kehadiran Ekonomi Syariah mendapatkan momentum utamanya saat kelahiran Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama pada tahun 1992. Setelah dua decade berlalu pada tahun 2013 Indonesia memiliki 11 bank umum Syariah, 23 unit usaha Syariah, 160 Bank Perkreditan Syariah, 3.143 kantor cabang dan *office channeling*, dan 15.000.000 nasabah³⁰. Di sektor mikro dan kredit informal, dengan 5000 lebih Baitul Mal wa Tamwil, Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah koperasi syariah terbesar di Dunia.

Dari unsur regulasi, Indonesia juga telah memiliki infrastruktur yang cukup lengkap dibandingkan beberapa negara anggota OKI lainnya. Hal ini dengan telah hadirnya Undang-Undang Perbankan Syariah (2008) UU Sukuk atau Surat Berharga Negara Syariah (2009) *Tax neutrality* produk-produk keuangan Syariah (2009). Di sisi lain Dewan Syariah Nasional sebagai badan otonom MUI dengan sangat aktif telah mengeluarkan tidak kurang dari 84 fatwa produk keuangan dan ekonomi syariah yang mencakup berbagai aspek seperti perbankan, asuransi, pasar modal, gadai, perdagangan dan jasa lainnya.

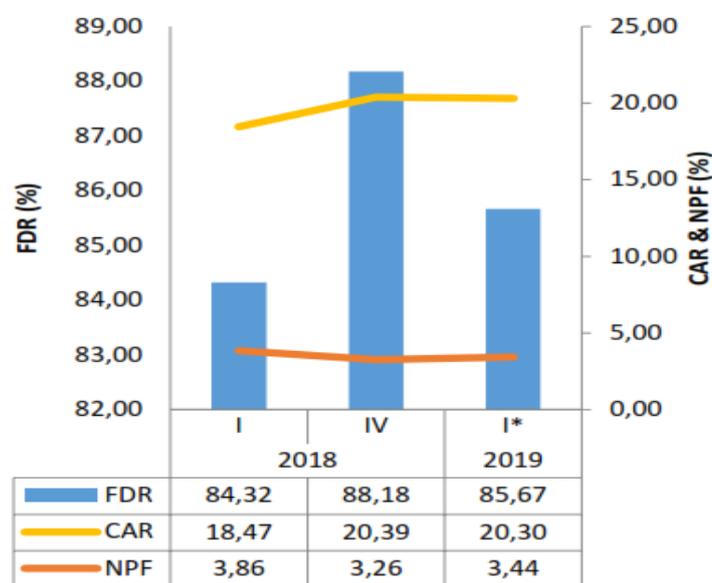
²⁸ *Ibid*, hal 59

²⁹ Coirul Tanjung, *Prospek Ekonomi Indonesia 2014*, Komite ekonomi Nasional, Jakarta 2014 hal 84

³⁰ *Ibid* hal 86

Cakupan industri keuangan syariah meliputi bank Syariah (bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, serta BPR Syariah), asuransi syariah, gadai syariah, reksadana syariah, *multifinance* syariah dan sukuk baik sukuk pemerintah maupun korporasi. Selain itu di pasar saham juga terdapat Jakarta Islamic Index (JII) dan Daftar Efek Syariah (DES) yang mengikutsertakan emiten-emiten yang memenuhi syarat usaha yang sesuai tuntunan syariah. Jika dilihat dalam konstalasi global, nilai aset industri keuangan syariah di Indonesia tahun 2013 akan naik 24 persen dari tahun sebelumnya menjadi USD 27,7 Milyar dan diperkirakan akan terus menaik sehingga pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar USD 33,9 Milyar atau naik 22 persen. Dengan perkembangan tersebut maka Islamic Finance Country Index untuk Indonesia akan terus membaik menjadi no 5 tahun 2013 dan diharapkan bisa menjadi no 4 pada tahun 2014³¹.

Gambar, 8. Perkembangan Kinerja perbankan Syariah 2018 - 2019



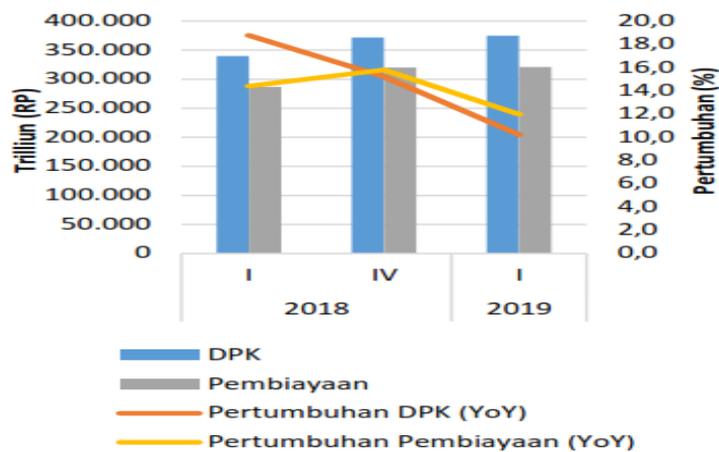
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perbankan Syariah pada triwulan I tahun 2019 mengalami peningkatan kinerja yang cukup baik. Dari sisi likuiditas, kondisi likuiditas perbankan syariah cukup memadai, ditunjukkan oleh besaran *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terjaga pada kisaran 80–90 persen, meskipun sedikit menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya dari sisi kualitas pembiayaan, kualitas pembiayaan cukup stabil, tercermin dari nilai *Non-Performing Financing* (NPF) perbankan syariah yang tidak banyak berubah, yaitu dari 3,3 persen pada triwulan IV tahun 2018, menjadi 3,4 persen pada triwulan I tahun 2019. Dari sisi permodalan, kondisi permodalan perbankan syariah mengalami peningkatan, tercermin dari nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang meningkat sebesar 1,83 persen (QtQ) pada triwulan I tahun 2019.³²

Gambar, 9. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Kredit Perbankan Syariah 2018 -2019

³¹ *Ibid* lihat juga Laporan Triwulan 3 OJK tahun 2013.

³² Kementerian Keuangan, Op. Cit hal 44



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
 Catatan: Angka triwulan I tahun 2019 merupakan angka bulan Februari

Dari jenis penggunaan, pertumbuhan pembiayaan untuk investasi mendominasi pertumbuhan pembiayaan bank syariah secara umum. Sementara itu, di saat yang sama Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh sebesar 0,77 persen (QtQ) atau sebesar 10,24 persen (YoY). Komposisi DPK perbankan syariah ditopang oleh DPK pada Unit Usaha Syariah yang tumbuh signifikan sebesar 20,63 persen (YoY). Secara umum, jumlah pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada masyarakat mengalami pertumbuhan yang relatif pesat pada triwulan I tahun 2019. Pertumbuhan pembiayaan bank syariah pada triwulan I tahun 2019 mencapai 13,79 persen (YoY) atau 2,71 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya.³³

Gambar, 10. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah 2018 -2019

Dalam Milyar Rupiah

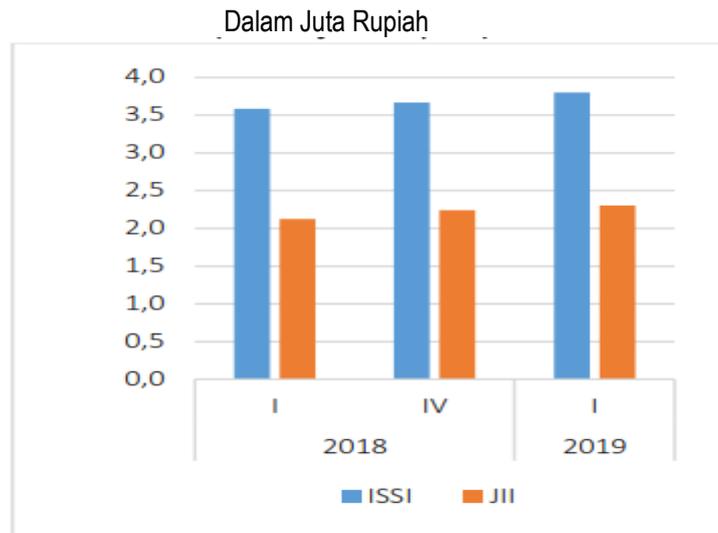
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad	2018		2019
	I	IV	I
Pembiayaan Investasi	67.502	75.730	76.241
Pembiayaan Modal Kerja	97.471	105.055	104.236
Pembiayaan Konsumsi	121.648	139.408	140.506
Total Pembiayaan	286.621	320.193	320.983

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
 Catatan: Angka triwulan I tahun 2019 merupakan angka bulan Februari

Pertumbuhan pembiayaan terbesar disumbangkan oleh pembiayaan konsumsi sebesar 17,11 persen (YoY) atau meningkat sebesar 2,58 persen (QtQ). Kondisi ini didorong oleh pertumbuhan kredit pembiayaan perumahan atau KPR. Sementara itu, jenis Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja juga mengalami pertumbuhan pada periode yang sama. Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja masing-masing tumbuh sebesar 12,73 persen (YoY) dan 10,31 persen (YoY).

Gambar, 11. Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham ISSI dan JII tahun 2018 2019

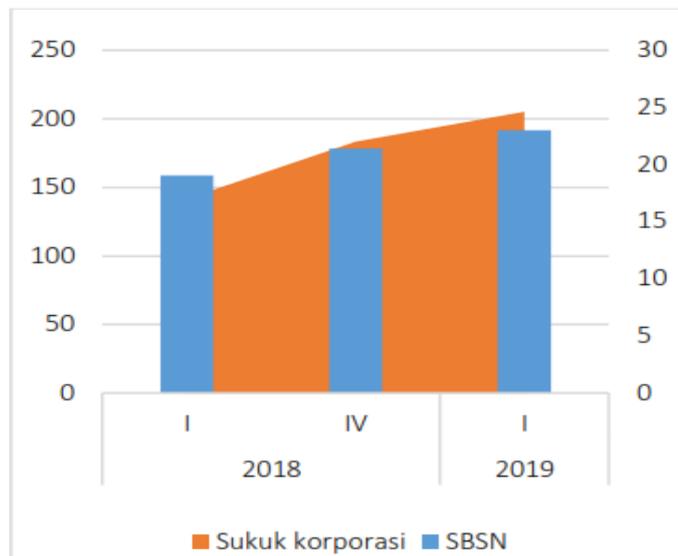
³³ Ibid, hal 45



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Seiring dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) juga turut mengalami penguatan pada triwulan I tahun 2019. Nilai kapitalisasi ISSI meningkat relatif kuat hingga Rp3.798 triliun, atau tumbuh 3,61 persen dari triwulan sebelumnya (QtQ). Sementara itu, pada periode yang sama nilai kapitalisasi saham *blue chip* JII menunjukkan penguatan senilai Rp2.302 triliun, atau tumbuh 2,81 persen dari triwulan sebelumnya (QtQ).

Gambar, 12. Perkembangan outstanding Sukuk Korporasi (Trilyun Rupiah)



Penguatan nilai kapitalisasi ISSI dan JII menunjukkan performa kinerja pasar modal syariah yang baik di tengah eksposur perekonomian global yang dinamis seperti terjadinya proteksionisme beberapa negara menyusul perang dagang AS dan Tiongkok, eskalasi krisis di Turki dan Argentina, serta rencana kenaikan suku bunga acuan Fed Rate. Sejalan dengan tren IHSG, ISSI dan JII, nilai *outstanding* sukuk korporasi pada triwulan I

tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 11,91 persen dari triwulan sebelumnya (QtQ) atau sebesar 44,82 (YoY) menjadi Rp24,62 triliun pada triwulan I tahun 2019.³⁴

Kondisi pasar sukuk korporasi cenderung tumbuh stabil, hal ini tercermin dari nilai *outstanding* yang terus meningkat baik secara triwulanan maupun tahunan. Namun demikian, nilai *outstanding* sukuk korporasi masih jauh jika dibandingkan dengan sukuk negara, sehingga pasar sukuk korporasi masih perlu dilakukan pendalaman agar dapat memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pada triwulan I tahun 2019, secara keseluruhan Industri Keuangan Non-Bank Syariah menunjukkan perkembangan yang kurang positif. Kondisi ini tercermin dari adanya penurunan secara umum pada jumlah aset Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Secara umum, aset Industri Keuangan Non-Bank Syariah mengalami penurunan sebesar 3,86 persen menjadi Rp94,20 triliun (YoY). Apabila ditinjau lebih rinci, Lembaga Pembiayaan Syariah mengalami penurunan aset secara signifikan sebesar 20,37 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (YoY), atau dari Rp32,77 triliun pada triwulan I tahun 2018 menjadi Rp26,10 triliun pada triwulan I tahun 2019. Walaupun secara umum total aset IKNB menurun, aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah meningkat paling tinggi yaitu sebesar 140,59 persen menjadi Rp278 miliar (YoY). Diikuti oleh peningkatan pada aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah sebesar 11,68 persen menjadi Rp25,13 triliun (YoY) sisanya aset Asuransi Syariah turun sebesar 0,12 persen menjadi Rp42,69 triliun (YoY).

PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI MAKRO SYARIAH DI INDONESIA

Cukup mengagetkan! Jakarta ternyata tidak masuk tiga besar pusat ekonomi syariah dunia. Tiga kota teratas yang sangat prospektif dalam mengembangkan ekonomi Islam tersebut adalah Dubai, Kuala Lumpur, dan London. Khusus London jelas sebuah ironi. Ekonomi syariah identik dengan negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam atau mayoritas penduduknya Muslim. Namun, Indonesia yang merupakan negara dengan basis penduduk Muslim terbesar di dunia malah jauh tertinggal ketimbang Inggris³⁵.

Pada hal, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah berjalan dua dekade lebih. Hal itu ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada 1991, sebagai titik awalnya. Memang perbankan syariah mengalami kemajuan, tapi lajunya sangat lambat. Tolok ukurnya adalah pasar perbankan syariah, yang menurut Bank Indonesia (BI) pada 2013, masih di bawah lima persen. Meski begitu, aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 179 triliun atau tepatnya 4,4 persen dibandingkan total aset perbankan nasional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menilai perkembangan ekonomi syariah pada kuartal I-2019 ini terbilang stagnan bahkan cenderung menurun. "Cenderung menurun dari sisi pencapaian *market share* (pangsa pasar) perbankan syariah sempat di atas 6% dibanding total perbankan nasional. Tetapi pada awal tahun ini kembali turun di bawah 6%," Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

³⁴ *Bid 45*

³⁵ Erik Purnama Putra, *Ekonomi Syariah, Harapan Masa Depan Indonesia* REPUBLIKA.CO.ID, Senin, 02 Desember 2013, 19:10 WIB

untuk data terakhir Juni 2018, *market share* keuangan syariah memang sempat mencapai 8,47% atau setara US\$83,62 miliar dari total aset keuangan Indonesia.³⁶

Total capain ini diperoleh dari kontribusi perbankan syariah sebesar 5,7%, IKNB syariah sebesar 4,69%, dan pasar modal syariah sebesar 15,28%. Akan tetapi, hingga awal 2019, *market share* perbankan syariah nasional hanya mampu mencapai 5,94%. Demikian pula dari segi pangsa pasar kapital market syariah dengan sukuk negara dan sukuk lainnya di dalam Daftar Efek Syariah (DES), juga tak memperlihatkan perkembangan signifikan dan masih berada pada kisaran 14% sejak tahun lalu. Faktor utama penyebab keterlambatan perkembangan keuangan syariah ini, ialah dari segi Non Performing Financing (Rasio Kredit Bermasalah/NPF) yang tinggi dan mesti diselesaikan terlebih dahulu.³⁷

"NPF yang tinggi jadi faktor utamanya dan ini harus diselesaikan dengan ditekan melalui berbagai macam upaya yang membuat pencapaian laba dan pengembangan portfolio pembiayaan," katanya. Merujuk pada data statistik perbankan syariah (SPS) yang dirilis oleh OJK posisi NPF berada di level 3,83% untuk bank umum syariah (BUS). Level ini terbilang lebih tinggi dibandingkan non performing loan (NPL) bank konvensional, yang hanya berada pada 2,67%. Keadaan stagnansi perekonomian syariah ini akan tetap terjadi di masa pemerintahan mendatang. Sampai pemerintahan hasil Pemilu 2019 terbentuk lengkap, ekonomi syariah akan tetap stagnan secara keseluruhan.

Aset industri keuangan syariah didominasi oleh sukuk negara sebesar Rp 651,29 triliun atau 50,4%. Industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang. Total aset industri keuangan syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp 1.291,48 triliun per Januari 2019. Nilai aset ini meningkat sebesar Rp 25,5 triliun dibandingkan dengan posisi September 2018 sebesar Rp 1.265,97 triliun. Aset industri keuangan syariah didominasi oleh sukuk negara sebesar Rp 651,29 triliun atau 50,4%. Di posisi kedua, aset perbankan syariah sebesar 479,17 triliun atau 37,1%. Di posisi ketiga, aset asuransi syariah mencapai Rp 43,12 triliun atau 3,34%.³⁸

Di posisi keempat ada reksa dana syariah senilai Rp 37,3 triliun atau 2,89%. Disusul oleh aset lembaga non-bank syariah Rp 32,43 triliun atau 2,5%, pembiayaan syariah Rp 25,61 triliun atau 1,99%, dan sukuk korporasi Rp 22,56 triliun atau 1,78%. Perhitungan aset industri keuangan syariah ini tidak memasukkan kapitalisasi pasar saham-saham syariah senilai Rp 3.861,7 triliun.³⁹

Merujuk fakta itu, jelas ada yang tidak beres dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai negara yang penduduknya sekitar 86 persen Muslim, keberadaan bank syariah masih terpinggirkan. Padahal, jika mengacu sesama negara serumpun, hambatan dan tantangan yang terjadi di Indonesia dan negeri jiran pasti tidak jauh berbeda. Aturan dan sistem yang diberlakukan Pemerintah Malaysia, misalnya, sangat

³⁶Soraya Novika, Market share perbankan syariah kuartal I-2019 turun, <https://www.alinea.id/bisnis/market-share-perbankan-syariah-kuartal-i-2019-turun-b1Xef9j1v> akses 13 Juli 2019, pukul 22.41

³⁷ *Ibid*

³⁸Hari Widowati, Aset Industri Keuangan Syariah Capai Rp 1.291,48 Triliun. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/aset-industri-keuangan-syariah-capai-rp-129148-triliun> akses 13 Juli 2019 pukul 23.01

³⁹ *Ibid*

berpihak terhadap perkembangan perbankan syariah. Keberpihakan Pemerintah Malaysia terlihat timpang jika melihat regulasi di negeri ini. Meski demikian, tidak ada salahnya pula bagi setiap perbankan syariah di Indonesia untuk bisa instropeksi diri dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah.

Dengan memperhatikan perkembangan diatas, Indonesia mempunyai potensi untuk bisa memposisikan diri sebagai pusat keuangan Syariah Dunia. Kita mempunyai modal yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut, karena disamping Indonesia adalah Negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga adalah anggota G-20 dan Negara dengan penduduk ke 5 terbesar dunia yang memiliki *middle income* yang tumbuh pesat. Ekonomi dan keuangan Syariah bisa memberi kontribusi yang amat signifikan dalam mengangkat kualitas ekonomi Indonesia.

Tentu ini merupakan peluang yang sangat prospektif dan sekaligus tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Mengingat peluang yang prospektif tersebut, rasanya sia-sia bila sistem perekonomian Islam tidak dibangun di atas pilar yang kuat. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis⁴⁰: *Pertama*, peningkatan sosialisasi konsep ekonomi Islam secara komprehensif. *Kedua*, pengembangan dan penyempurnaan institusi-institusi ekonomi syariah yang sudah ada. Jangan sampai transaksi-transaksi yang dilakukan tidak sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam.

Ketiga, perbaikan dan penyempurnaan regulasi-regulasi yang ada. *Keempat*, peningkatan kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan wawasan ekonomi syariah yang memadai. *Kelima*, inovasi produk. Keberhasilan ekonomi Islam di masa depan banyak bergantung pada kemampuan perbankan syariah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak menutup kemungkinan ekonomi syariah juga menghadapi tantangan. Pertama, hasil survei BNI Syari'ah (2005) menunjukkan bahwa penetrasi aset perbankan syariah pada 2004 baru sebesar 1,15 persen, sementara itu sekitar 51 persen masyarakat Indonesia menyatakan tidak setuju dengan bunga. Dengan demikian, secara optimis disimpulkan potensi pasar perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah masih sangat besar. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dengan para alim ulama, lembaga pendidikan, dan perbankan syariah merupakan suatu keniscayaan. Peran para ulama, tokoh masyarakat, dan Lembaga Perguruan Tinggi Islam sangat strategis dalam menggalakkan sosialisasi ini, di samping sebagai praktisi Lembaga Keuangan Syariah.

Kedua, masih lemahnya jaringan atau sinergi yang kuat antara sesama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga zakat dan wakaf. Keempat, belum berkembangnya ilmu ekonomi syariah yang dapat dikembangkan melalui dunia pendidikan dan pengetahuan, baik itu di kampus-kampus, penelitian-penelitian ilmiah, kelompok-kelompok kajian, ataupun media massa. Memang, saat ini ilmu ekonomi syariah telah berkembang tidak hanya di dunia pendidikan Islam, namun telah memasuki dunia pendidikan secara umum. Kampus-kampus besar di Indonesia telah melakukan kajian-kajian akademis terhadap fenomena dan perkembangan keilmuan ekonomi syariah. Sudah

⁴⁰ Ahmad Rodoni (Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta) *Republika Online* 11 November 2013

saatnya kajian ekonomi Islam mendapat ruang dan tempat yang lebih luas lagi di perguruan tinggi. Kurikulum ekonomi Islam pun perlu senantiasa disempurnakan, diintegrasikan antara pendekatan normatif keagamaan dan pendekatan kuantitatif empiris. Riset-riset tentang ekonomi syariah, baik pada skala mikro maupun makro harus diperbanyak. Ini akan memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi syariah secara utuh dan menyeluruh.

SIMPULAN

Ekonomi Makro Syariah di Indonesia belum cukup signifikan dalam mempengaruhi kondisi ekonomi makro di Indonesia, dikarenakan asetnya yang masih kecil bila dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Indonesia mempunyai potensi untuk bisa memposisikan diri sebagai pusat keuangan Syariah Dunia. Kita mempunyai modal yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut, karena disamping Indonesia adalah Negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga adalah anggota G-20 dan Negara dengan penduduk ke 5 terbesar dunia yang memiliki *middle income* yang tumbuh pesat. Ekonomi dan keuangan Syariah bisa memberi kontribusi yang amat signifikan dalam mengangkat kualitas ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aditya Nugroho. *Sistem ekonomi Indonesia*, dalam <http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2011/02/sistem-ekonomi-indonesia.html> /accessed 2 Agustus 2012
- Ahmad Rodoni (Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta) *Republika Online* 11 November 2013
- BPS, *Berita Resmi Statistik*, 15 Januari 2019
- Bank Indonesia, *Analisis Uang Beredar dan Faktor yang Mempengaruhi*, Maret 2019.
- Coirul Tanjung, *Prospek Ekonomi Indonesia 2014*, Komite ekonomi Nasional, Jakarta 2014
- Erik Purnama Putra, *Ekonomi Syariah, Harapan Masa Depan Indonesia* REPUBLIKA.CO.ID, Senin, 02 Desember 2013, 19:10 WIB
- Gustra Arianda, *Makro Ekonomi Indonesia*, dalam <http://payakumbuh.blogspot.com/2011/05/contoh-makalah-ekonomi-makro-di.html> / accessed 3 Agustus 2013
- Halim Alamsyah Dr., Deputi Gubernur Bank Indonesia *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015* www.bi.go.id
- Kementerian Keuangan RI, *APBN Kita, Kinerja dan Fakta*, Edisi Mei 2019 hal 15. Lihat juga Kementerian BPPN/Bapenas, *Perkembangan Ekonomis Indonesia dan Dunia, Truwulan I Tahun 2019, Vol 13 no 1. Mei 2019*
- Kementerian Keuangan RI. APBN Kita, Edisi Mei 2019
- Laporan triwulan 3 OJK tahun 2013 Novita Aprillia, *Sistem Ekonomi Indonesia*, <http://nophitaputri.blog.fisip.uns.ac.id/2011/05/23/artikel-sistem-ekonomi-indonesia-tugas-kelompok-untuk-memenuhi-mata-kuliah-sistem-ekonomi-indonesia/>
- Mucholifah, *Ekonomi Makro*. Unesa University Pers 2008
- Sri Adiningsih, Prof. Dr. *Indonesian Economic Review and outlook Macroeconomic dashboard team*. Fakultas ekonomi dan bisnis UGM Yogyakarta 2014
- www.bps.go.id

www.ojk.go.id

www.bi.go.id

www.id.wikipedia.org

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/>

Barratut Taqiyah dan Edy Can, *Ekonomi tetap tumbuh di tengah krisis Eropa*, dalam [http://lipsus.kontan.co.id/v2/outlook/read/42/ekonomi_makro/accessed 3 Agustus 2013](http://lipsus.kontan.co.id/v2/outlook/read/42/ekonomi_makro/accessed%203%20Agustus%202013)

Kompas.com dengan judul "Bank Dunia: Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2019 Melemah", <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/101500026/bank-dunia--laju-pertumbuhan-ekonomi-global-2019-melemah>. Mutia Fauzia Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia-triwulan-i-tahun-2019/>

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-3-permasalahan-ekonomi-modern-untuk-peningkatan-bisnis/>

Aditya Nugroho. *Sistem ekonomi Indonesia*, dalam <http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2011/02/sistem-ekonomi-indonesia.html> /

Novita Aprillia, *Sistem Ekonomi Indonesia*, <http://nophitaputri.blog.fisip.uns.ac.id/2011/05/23/artikel-sistem-ekonomi-indonesia-tugas-kelompok-untuk-memenuhi-mata-kuliah-sistem-ekonomi-indonesia>

id.wikipedia.org

Gustra Arianda, *Makro Ekonomi Indonesia*, dalam <http://payakumbuh.blogspot.com/2011/05/makalah-ekonomi-makro-di.html>

Barratut Taqiyah dan Edy Can, *Ekonomi tetap tumbuh di tengah krisis Eropa*, dalam http://lipsus.kontan.co.id/v2/outlook/read/42/ekonomi_makro/ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>,

Iqbal Musyaffa, *Bank Indonesia tempuh 5 kebijakan hadapi ekonomi 2019*, <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bank-indonesia-tempuh-5-kebijakan-hadapi-ekonomi-2019/1431048>

ROSIANA HARYANTI Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Relaksasi Pajak Barang Mewah Bakal Bangkitkan Sektor Properti", <https://properti.kompas.com/read/2019/03/29/172048821/relaksasi-pajak-barang-mewah-bakal-bangkitkan-sektor-properti?page=all>.

www.bps.go.id

<https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>

Noverius Laoli Harian KONTAN <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-negara-menunjukkan-sinyal-mengkhawatirkan>

Erik Purnama Putra, *Ekonomi Syariah, Harapan Masa Depan Indonesia* REPUBLIKA.CO.ID,

Soraya Novika, *Market share perbankan syariah kuartal I-2019 turun*, <https://www.alinea.id/bisnis/market-share-perbankan-syariah-kuartal-i-2019-turun-b1XeF9j1v>

Hari Widowati, *Aset Industri Keuangan Syariah Capai Rp 1.291,48 Triliun*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/aset-industri-keuangan-syariah-capai-rp-129148-triliun>

Ahmad Rodoni (Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta) *Republika Online* 11 November 2013